



**RANCANGAN
RENJA**

2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen ini dengan baik. Rancangan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Transisi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026.

Di dalam Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini dijabarkan berbagai rencana tujuan dan sasaran serta program kegiatan prioritas setelah dilakukan penelaahan terhadap capaian kinerja periode sebelumnya.

Rancangan Renja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 guna pencapaian kinerja dinas dalam kurun waktu satu tahun.

Akhir kata, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA PANGKALPINANG, 


ENDANG SUPRIYADI, S.T., M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760612 200003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra perangkat daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen perangkat daerah, Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja Perangkat daerah disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara partisipatif.

Dokumen ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);

14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta proyeksi tahun 2026;
2. Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

- 4.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
- 1.3 Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

TRIWULAN IV

Evaluasi Terhadap Hasil Renja

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Seser an	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020702	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:Persen)	80	144.962.300	0	0	85	360.000	0	0	0	0	80,150	0	85,710	360.000	85,710	360.000	85,710	360.000	100	0,248	B I D A N G KETENAGAKERJAAN
				Persentase tenaga kerja formal (Dengan Satuan:Persen)	71		0		71		0		0		0		0		0		0		0		B I D A N G KETENAGAKERJAAN
				Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Dengan Satuan:Persen)	5,300		0		5,300		0		0		0		0		0		0		0		B I D A N G KETENAGAKERJAAN
				Tingkat sebagian pengangguran (Dengan Satuan:Persen)	3,190		0		3,190		0		0		0		0		0		0		0		B I D A N G KETENAGAKERJAAN
2		020702204	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah laporan Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) (Dengan Satuan:Laporan)	0	144.962.300	0	0	1	360.000	0	0	0	0	0	0	1	360.000	1	360.000	1	360.000	100	0,248	SUB KOORDINATOR PERLUASAAN PEMERUPAAN PELATIHAN

[illegible]

KABUPATEN/KOTA																
19	001709202001	Pengembangan Perencanaan, Analisis Kebijakan, dan Penelitian (yang Perencanaan yang Swadaya/Berdaya Kita) Kabupaten dan Kota	Jumlah Perserta Penelitian yang Terselaku (Dengan Saluran Perantara)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,595	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWALAN
20	001709202001	Pengembangan Perencanaan, Analisis Kebijakan, dan Penelitian (yang Perencanaan yang Swadaya/Berdaya Kita) Kabupaten dan Kota	Jumlah Perserta Penelitian yang Terselaku (Dengan Saluran Perantara)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWALAN
21	001709202004	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi (Dengan Saluran Perantara)	Jumlah Saluran Irigasi yang Terselaku (Dengan Saluran Perantara)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091	SUB KODEINATOR STABIL KEMAHIRAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DATA-BAYA CAPAIAN KINERJA (N)																
PREDIKSI KINERJA																
22	021301	PROGARAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA	persentase laporan kinerja yang dihasilkan dan disajikan kepada pimpinan daerah (Dengan Saluran Perantara)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28,241	SEKRETARIAT
			persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Saluran Perantara)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	SEKRETARIAT
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (saluran indikator)	Target Kinerja Daerah pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di realisasi tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Indikator)	Target Renstra Peringkat Daerah pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peringkat Daerah dengan Renstra Peringkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Biaya Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Trivulan tahun 2023										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Peringkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab					
						6		7		8		11												13		14		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
31		021801206004	Penyediaan Bahan Logistik dan Sub Kegiatan	Jumlah Paket Logistik Bahan Logistik yang Disalurkan (Dengan Satuan Paket)	0	72.347.330	0	0	2	64.694.275	0	0	0	0	2	26.137.025	2	63.294.275	2	63.294.275	2	63.294.275	100	87.487	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
32		021801206005	Penyediaan Bahan Logistik dan Sub Kegiatan	Jumlah Paket Logistik Bahan Logistik yang Disalurkan (Dengan Satuan Paket)	0	31.967.400	0	0	0	126.245.340	0	0	0	0	0	31.385.230	0	107.937.750	0	107.937.750	0	100	100					
33		021801206009	Penyediaan Bahan Logistik dan Sub Kegiatan	Jumlah Paket Logistik Bahan Logistik yang Disalurkan (Dengan Satuan Logistik)	0	330.979.567	0	0	0	173.633.347	0	0	0	0	0	112.808.819	0	173.525.842	0	173.525.842	0	100	54.081	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN				
34		021801207	Program dan Sub Kegiatan	Jumlah Paket Logistik Bahan Logistik yang Disalurkan (Dengan Satuan Logistik)	0	332.467.374	0	0	0	105.399.000	0	0	0	0	0	184.792.800	0	184.792.800	0	184.792.800	0	100	55.579		SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN			
35		021801207010	Program dan Sub Kegiatan	Jumlah Paket Logistik Bahan Logistik yang Disalurkan (Dengan Satuan Logistik)	0	300.800.000	0	0	0	102.779.000	0	0	0	0	0	184.792.800	0	184.792.800	0	184.792.800	0	100	92.115			SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN		
36		021801208	Program dan Sub Kegiatan	Jumlah Paket Logistik Bahan Logistik yang Disalurkan (Dengan Satuan Logistik)	0	307.837.360	0	0	0	319.412.500	0	0	0	0	0	118.777.668	0	301.506.817	0	301.506.817	0	100	64.379	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN				
37		021801208002	Program dan Sub Kegiatan	Jumlah Paket Logistik Bahan Logistik yang Disalurkan (Dengan Satuan Logistik)	0	275.000.000	0	0	0	137.754.716	0	0	0	0	0	48.499.564	0	142.854.157	0	142.854.157	0	100	51.387		SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN			
38		021801208005	Program dan Sub Kegiatan	Jumlah Paket Logistik Bahan Logistik yang Disalurkan (Dengan Satuan Logistik)	0	34.170.000	0	0	0	63.665.000	0	0	0	0	0	38.000.000	0	61.195.000	0	61.195.000	0	100	77.439			SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAHAN		

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Rencana Peringkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Perantara Peringkat Daerah dengan tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Trivulan tahun 2023												Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Peringkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
59		021805201002	Koordinasi dan Subkonsumsi Pembiayaan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Keluaran yang Mendapatkan Pemeliharaan Perencanaan dan Pelaksanaan (Dengan Satuan:Perahu)	218.000.000		0	0	320	381.064.480	0	0	31.682.395	0	315.646.187	143	93.993.916	143	248.313.338	143	249.225.598	100	100			SUB KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
60		021805201001	Koordinasi dan Subkonsumsi Pembiayaan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Keluaran yang Mendapatkan Pemeliharaan dan Subkonsumsi Pembiayaan Pemeliharaan Jalan (Dengan Satuan:Kegilas dan Ulat)	740.172.000		0	0	12	32.531.510	0	0	0	0	303.000	11	18.448.000	11	19.021.000	11	19.021.000	100	100			SUB KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
BATA-BATA CAPAIAN KINERJA (N)																											
PREDIKAT KINERJA																											
61		021804	P. R. D. G. R. A. M. PENGOLAHAN DATA DAN SIS. I. S. T. E. M. I. N. F. O. R. M. A. S. I. P. E. N. A. N. A. M. A. N. M. O. D. A. L.	persentase jalan yang diambatkan secara online (Denda dan Saluran Paralel)	82.050	72.000.390	0	0	83.050	104.955.000	91.010	0	91.010	0	91.010	0	88.420	100.375.000	88.420	100.375.000	100	100	100	100			SEKRETARIS
62		021805201	Pengelolaan Data dan Subkonsumsi Pembiayaan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Keluaran yang Mendapatkan Pemeliharaan dan Subkonsumsi Pembiayaan Pemeliharaan Jalan (Dengan Satuan:Kegilas dan Ulat)	72.000.390		0	0	1	104.955.000	0	0	0	0	0	0	1	100.375.000	1	100.375.000	100	100	100	100			SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA, PELAYANAN DAN SISTEM INFORMASI
63		021805201001	Pengelolaan Data dan Subkonsumsi Pembiayaan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Keluaran yang Mendapatkan Pemeliharaan dan Subkonsumsi Pembiayaan Pemeliharaan Jalan (Dengan Satuan:Kegilas dan Ulat)	72.000.390		0	0	3	104.955.000	0	0	0	0	0	0	3	100.375.000	3	100.375.000	100	100	100	100			SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PENYUNDAH
BATA-BATA CAPAIAN KINERJA (N)																											
PREDIKAT KINERJA																											
BATA-BATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (N)																											

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

[illegible]

[illegible]

		kerja	Pasar Kerja																									
		Sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					100	or g	147.028.188,00	0	12.635.848,00							12.635.848,00	0,00%	8,59%							
		Sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja					50	or g	132.399.740,00	0	-							-	0,00%	0,00%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	4,52%								
Predikat Kinerja																			SR	SR								
3		Program hubungan industri	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang					40,00	%	35.871.846,00	9	6.067.924,00	-	-	-	-	9	6.067.924,00	22,73%	16,92%							DPM PTS P&N AKER	

[illegible]

[illegible]

		Sub kegiatan penyelesaian hubungan industri, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan						40	perkara	25.352.946,00	3	6.067.924,00					3,00	6.067.924,00	7,50%	23,93%							
		Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina						1	lembaga	5.503.400,00							-	-	0,00%	0,00%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				22,73%	16,92%							

Predikat Kinerja																			SR	SR					
4		Program penunjang urusan pemerintahan/ kabupaten/ kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					76,90	%	6.900.453.376,00	77,15	1.447.713.486,00						77,15	100,33%	20,98%					DPM PTS P&N AKER
	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah						85										0,00	0,00%							
	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD						5,25	%	0,60								0,60	11,47%							
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP					100	%	5.872.238.608,00	25	1.265.876.376,00													
		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan					46	orang	5.872.238.608,00	46	1.265.876.376,00						46,00	100,00%	21,56%					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota						1	do k	174.652.696,00	0	6.067.924.00							6.067.924,00	0,00%	3,47%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				504,20%	3,47%								
Predikat Kinerja																				ST	SR								
7		program pelayanan penanaman modal	Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terlayani						85	%											0,00%								DPM PTS P&N AKER
			persentase penanganan pengaduan dan atau konsultasi masyarakat yang diselesaikan						85	%	251.933.282,00		29.150.312,00		-	-	-			29.150.312,00		11,57%	0,00%						

		kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayan an yang dilaksanak an					3	p el a y a n a n	251.933. 282,00	3	29.150.31 2,00													
		sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenang an Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisa si Penentapa n Pemberian Fasilitas/ln sentif yang menjadi Kewenang an Kabupaten /Kota					1	d o k	3.400.00 0,00	0	-	0	.	0,00%	0,00%									

		sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik						4000	pelaku usaha	239.940.932,00	4544	29.150.312,00						4.544	29.150.312,00	113,60%	12,15%					
		sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha						200	kegiatan usaha	8.592.350,00	9							9	-	4,50%	0,00%					

[illegible]

		sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						5	k e g i a t a n u s a h a	24.031.900,00								-	-	0,00%	0,00%					
		sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						140	p e l a k u u s a h a	261.946.338,00		11.495.437,00							11.495.437,00	0,00%	4,39%					

		sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha						9	k e g i a t a n u s a h a	159.875,454,00		6.817.924,00							6.817.924,00	0,00%	4,26%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	4,11%							
Predikat Kinerja																				SR	SR							
9		program pengelolaan data dan sistem informasi	persentase izin yang diterbitkan secara online						100,00	%	93.695.892,00	88,64	8.757.232,00	-	-	-	88,64	8.757.232,00	88,64%	9,35%							DPM PTS P&N AKE R	

[illegible]

[illegible]

Disusun
Pangkalpinang, April 2024

Dievaluasi
Pangkalpinang, Tanggal
.....

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG

Skala Penilaian Peringkat
Kinerja

1	91 % ≤ 100 %	: Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	: Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	: Sedang
4	51 % ≤ 65 %	: Rendah
5	≤ 50%	: Sangat Rendah

KOTA PANGKALPINANG

KOTA PANGKALPINANG

ENDANG SUPRIYADI,
ST, MT
PEMBINA UTAMA
MUDA
NIP. 19760612 200003
1 003

YAN RIZANA, ST.M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680414 199603 1 000

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki anggaran sebesar Rp.8.531.004.004,00 dengan pembagian anggaran bagi urusan penanaman modal sebesar Rp.7.953.747.730,00 termasuk dengan belanja pegawai gaji dan tunjangan ASN.

Urusan penanaman modal mengampu 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Capaian kinerja dan keuangan masih sangat rendah dikarenakan banyak kegiatan yang memang jadwal pelaksanaannya mulai triwulan kedua.

Terutama untuk capaian program masih ada yang belum terisi dikarenakan masih dalam proses pengolahan data oleh bidang penanggung jawabnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu penanaman modal.

Pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	600 Milyar	1.605.577.373.463,27	267.5%

Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai realisasi investasi PMDN dari tahun 2022 ke tahun 2023:

- a. Adanya call center/WA/Website dinas yang dapat dihubungi terkait konsultasi/pengaduan pelayanan perizinan/penanaman modal;
- b. Adanya pendampingan pengisian LKPM, baik di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja maupun di perusahaan;
- c. Adanya Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko bagi para pelaku usaha/perusahaan;
- d. Adanya pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

Pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	nilai hasil evaluasi kinerja	75	-	Masih proses penilaian oleh Kementerian Investasi
Meningkatnya nilai investasi	nilai investasi PMDN	500 M	1.139.891.021.367	

2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berikut ini tercantum isu penting penyelenggaraan dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan masing-masing bidang, yang mungkin di kemudian hari dapat diselesaikan demi optimalnya pelaksanaan tugas :

1. Kurangnya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman modal daerah;
2. Kurangnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, non perizinan dan pengaduan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Ranwal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
Program	Lokasi	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2025		Program	Lokasi	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2025	
		Kinerja		Target capaian kinerja	Pagu indikatif			Kinerja		Target capaian kinerja	Pagu indikatif
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PGK	Jumlah investasi PMDN	Rp	2.848.123.344.741	49.900.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PGK	Jumlah investasi PMDN	Rp	2.848.123.344.741	49.900.000
<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	PGK	<i>jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>laporan</i>	1	49.900.000	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	PGK	<i>jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>laporan</i>	1	49.900.000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PGK	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	49.900.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PGK	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	49.900.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PGK/ Luar PGK	jumlah investor PMDN	NIB	6.646	249.500.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PGK/ Luar PGK	jumlah investor PMDN	NIB	6.646	249.500.000
<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	PGK/ Luar PGK	<i>jumlah event yang diikuti</i>	<i>event</i>	1	249.500.000	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	PGK/ Luar PGK	<i>jumlah event yang diikuti</i>	<i>event</i>	1	249.500.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PGK/ Luar PGK	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	249.500.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PGK/ Luar PGK	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	249.500.000

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PGK	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	30.00 %	333.279.500	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PGK	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	30.00 %	333.279.500
<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	PGK	<i>jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>	<i>333.279.500</i>	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	PGK	<i>jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>	<i>333.279.500</i>
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	PGK	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	5	24.024.500	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	PGK	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	5	24.024.500
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	PGK	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	140	261.925.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	PGK	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	140	261.925.000
Pengawasan Penanaman Modal	PGK	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi	Kegiatan Usaha	9	47.330.000	Pengawasan Penanaman Modal	PGK	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi	Kegiatan Usaha	9	47.330.000

		Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	PGK	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	13.240	75.535.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	PGK	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	13.240	75.535.000
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	PGK	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	200	53.580.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	PGK	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	200	53.580.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PGK	persentase izin yang diterbitkan secara online	%	100	38.800.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PGK	persentase izin yang diterbitkan secara online	%	100	38.800.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PGK	laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat	laporan	1	38.800.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	PGK	laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat	laporan	1	38.800.000

		Daerah Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota			
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PGK	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	3	38.800.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PGK	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	3	38.800.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PGK	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	8.429.868.735	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PGK	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	8.429.868.735
	PGK	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	87			PGK	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	87	
	PGK	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	%	4,64			PGK	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	%	4,64	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PGK	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	6.488.587.085	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PGK	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	6.488.587.085
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PGK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	34	6.488.587.085	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PGK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	34	6.488.587.085
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PGK	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	-33	103.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PGK	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	-33	103.750.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PGK	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	45	33.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PGK	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	45	33.750.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PGK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	10	70.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PGK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	10	70.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	PGK	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	756.704.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PGK	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	756.704.650
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PGK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	8.694.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PGK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	8.694.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK/ Luar PGK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	496.817.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK/ Luar PGK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	496.817.650
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PGK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	49.434.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PGK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	49.434.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PGK	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	51.758.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PGK	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	51.758.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PGK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PGK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	PGK	Persentase pengadaan barang milik	%	100	175.459.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	PGK	Persentase pengadaan barang milik	%	100	175.459.000

<i>Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>perangkat daerah</i>				<i>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>perangkat daerah</i>			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PGK	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	175.459.00 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PGK	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	175.459.00 0
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>PGK</i>	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>%</i>	100	718.978.00 0	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>PGK</i>	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>%</i>	100	718.978.00 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	219.630.00 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	219.630.00 0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	53.150.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	53.150.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	446.198.00 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	446.198.00 0
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>PGK</i>	<i>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	100	186.390.00 0	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>PGK</i>	<i>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	100	186.390.00 0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	PGK	Jumlah Kendaraan Perorangan	unit	1	37.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	PGK	Jumlah Kendaraan Perorangan	unit	1	37.000.000

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PGK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	88.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PGK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	88.190.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PGK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	61.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PGK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	61.200.000
					9.244.463.235						9.244.463.235

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak tersedia usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKP pada 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Prioritas Kota Pangkalpinang Tahun 2025 :

1. Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah;
2. Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem
3. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Serta Daya Saing Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan
5. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan
6. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
7. Peningkatan kualitas pembangunan gender

Pencapaian pembangunan daerah tidak terlepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan

perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kota Pangkalpinang. Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Kota Pangkalpinang dijabarkan melalui tabel keterkaitan tujuan sasaran Kota dengan Dinas, dimana tujuan sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan seperti yang terdapat pada bab empat dokumen Renja ini.

TUJUAN KOTA	IND TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	IND SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	IND TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IND SASARAN OPD
meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance	indeks reformasi birokrasi	meningkatnya kualita pelayanan publik berbasis IT	IKM	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan nilai investasi PMDN	indeks kepuasan masyarakat layanan perizinan	meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	nilai hasil evaluasi kinerja
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	laju pertumbuhan ekonomi	meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	realisasi investasi		persentase capaian nilai investasi PMDN	Meningkatnya nilai investasi	nilai investasi PMDN

Kebijakan lain yang menjelaskan mengenai evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Permendagri 18 Tahun 2020. Dari beberapa kegiatan yang terdapat pada Permendagri tersebut, telah diakomodir dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

No.	Substansi kegiatan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020	Diakomodir dalam RPD 2025
1.	Urusan Penanaman Modal Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota - PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; - Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal; - Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal; - Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting; - Kegiatan pameran penanaman modal; - Kegiatan penerimaan misi penanaman modal; - Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal; - Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal; - Laporan realisasi penanaman modal; - Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota; - Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN; - Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	√ √ √ √ √ √ √ √

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023 sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 seperti pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun ke		
				2021	2022	2023
Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi		Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN	%	30	43	50
	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	Milyar Rupiah	280	400	600

Sedangkan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026 berdasarkan Renstra Transisi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2021	2022	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		indeks kepuasan masyarakat layanan perizinan	Nilai	86,24	90,33	85	87	90	90
		meningkatnya hasil evaluasi kinerja layanan penanaman modal	nilai hasil evaluasi kinerja	Nilai	79		75	77	79	79
3.	meningkatkan nilai investasi PMDN		persentase capaian nilai investasi PMDN	%	602.359,00	659,45	3	5	7	7
		Meningkatnya nilai investasi	nilai investasi PMDN	Rp	3.312.974.474.099	3.956.674.829.280	500 M	600 M	700 M	700 M

Untuk target indeks kepuasan masyarakat layanan perizinan tahun 2025 adalah 89 dikarenakan capaian IKM di tahun 2023 adalah 88,72 sedangkan target nilai investasi tahun 2025 adalah Rp.2.848.123.344.741 dikarenakan capaian nilai investasi 2023 sudah Rp.2.748.123.344.741.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 berikut:

Tujuan RPD:	
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance
2.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran RPD:	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT
2.	meningkatnya pertumbuhan investasi daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan:

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	02	2.02		KEGIATAN Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2	18	02	2.02	01	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	03	2.01		KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2	18	03	2.01	02	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	05	2.01		KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	05	2.01	04	SUB KEGIATAN Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2	18	05	2.01	05	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	06	SUB KEGIATAN Pengawasan Penanaman Modal
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2	18	04	2.01		KEGIATAN <i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>
2	18	04	2.01	05	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	04	2.01	06	SUB KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	2.01	08	SUB KEGIATAN Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	18	06	2.01		KEGIATAN <i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	18	06	2.01	01	SUB KEGIATAN Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	18	01	2.02		KEGIATAN <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
2	18	01	2.02	01	SUB KEGIATAN penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2	18	01	2.05		KEGIATAN <i>administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>
2	18	01	2.05	02	SUB KEGIATAN pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
2	18	01	2.05	09	SUB KEGIATAN pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
2	18	01	2.06		KEGIATAN <i>Administrasi Umum perangkat daerah</i>
2	18	01	2.06	01	SUB KEGIATAN penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2	18	01	2.06	02	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	18	01	2.06	04	SUB KEGIATAN penyediaan bahan logistik kantor
2	18	01	2.06	05	SUB KEGIATAN penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2	18	01	2.06	09	SUB KEGIATAN penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2	18	01	2.07		KEGIATAN <i>pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>
2	18	01	2.07	10	SUB KEGIATAN pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
2	18	01	2.08		KEGIATAN <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
2	18	01	2.08	02	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

2	18	01	2.08	03	SUB KEGIATAN penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2	18	01	2.08	04	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2	18	01	2.09		KEGIATAN <i>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
2	18	01	2.09	01	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2	18	01	2.09	02	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	18	01	2.09	09	SUB KEGIATAN pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANJUK PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRAKTIK CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENJAJARAN					KELOMPOK SASARAN		PILANGAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DASAR PERANGKAT JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perekonomian Gubernur dan Perekonomian Masyarakat				2 Pukul	51.198.000.00	Kota Pangkal Prang, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pendang- nan Perekon- omi Masyarakat	-	0.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.20.0006		Peningkatan Kapasitas Kordinator dan Kordinator SIKPO														
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Kordinator dan Kordinator SIKPO				1 Laporan	150.000.000.00	Kota Pangkal Prang, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pendang- nan Perekon- omi Masyarakat	-	0.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.27		Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Uraan Peningkatan Daerah	Pengadaan barang milik peningkatan daerah	100%			100%	175.459.000.00			-	Pendang- nan Perekon- omi Masyarakat	100%	150%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.27.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun				2 Unit	175.459.000.00	Kota Pangkal Prang, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pendang- nan Perekon- omi Masyarakat	-	0.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.28		Pengadaan Jasa Penyediaan Uraan Peningkatan Daerah	Pengadaan jasa penyediaan uraan peningkatan daerah	100%			100%	718.979.000.00			-	Pendang- nan Perekon- omi Masyarakat	100%	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.28.0003		Pengadaan Jasa Penyediaan, Sumbat Daya Air dan Lainnya														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan, Sumbat Daya Air dan Lainnya yang dibangun				1 Laporan	718.979.000.00	Kota Pangkal Prang, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pendang- nan Perekon- omi Masyarakat	-	0.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANSI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRANSI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERAANGKA PENGANAAN					KELOMPOK BASISAN		PILAIKURAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		REVISI/AMAT DAERAH PENGANGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAU MUKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAU MUKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Berkas yang telah Operasionalisasi	1 Unit	01.200.000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangu nan Pemas ritaan Aksesibil itas Rutornasi Blokasi dan Cemilasi Daerah	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	2.18.03	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN	284812344 741 Rp	49.908.000.00	284812344 741 Rp	1 Laporan	40.900.000.00	1 Laporan	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2.18.03.2.21		Pembuatan Peta Jalan Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah investasi Pembangunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Laporan	40.900.000.00	1 Laporan	1 Laporan	40.900.000.00	1 Laporan	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2.18.03.2.12.0001		Pengajuan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah/Kota	Jumlah Rencana Daerah (Peta) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.900.000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	40.900.000.00	1 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN	8648 MB	240.500.000.00	8648 MB	1 Event	240.500.000.00	1 Event	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2.18.03.2.21		Pengembangan Promosi Program Modal yang Mengedukasi Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah awal yang telah diketahui	2 Event	240.500.000.00	2 Event	2 Event	240.500.000.00	2 Event	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2.18.03.2.21.0002		Pembinaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	240.500.000.00	1 Dokumen	1 Dokumen	240.500.000.00	1 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase penyelesaian pengajuan dan adu konflik masyarakat yang diselesaikan Persentase partisipasi dari non pemerintah penanaman modal yang terlayani	90 % 90 %	143.115.000.00	90 % 90 %	90 % 90 %	143.115.000.00	90 % 90 %	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKENSTRUKSI OPD	REALISASI CAPAIAN BENJA OPD TAHUN 2023	PEKERJAAN CAPAIAN TARGET REKONSTRUKSI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBERAKSIAN PENDANAAN					KELOMPOK BASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023	PASU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.10.04.2.01	2.10.04.2.01	Pelayanan Penerimaan dan Non Perchastan Baznas Terpadu Satu Pintu Bidang Penerimaan Modal yang Menjadi Kewirausahaan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pelayanan yang dibuktikan	37% (Laporan)	6	7	8	143.115.200.00	10	11	12	Pembangunan Ekonomi Eksklusif, Inovasi, Riset dan Pengembangan, Pendidikan, Kesehatan dan Demokratisasi Daerah	-	37% (Laporan)	16	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.10.04.2.01	2.10.04.2.01	Kontribusi dan Berkontribusi Penerimaan Fasilitas/Transaksi Daerah	Jumlah Kegiatan Kewirausahaan dan Berkontribusi Penerimaan Fasilitas/Transaksi yang menjadi Kewirausahaan Kabupaten Kota	37% (Laporan)	6	7	2 Diskusi	14.020.000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Eksklusif, Inovasi, Riset dan Pengembangan, Pendidikan, Kesehatan dan Demokratisasi Daerah	-	0,00	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.10.04.2.01	2.10.04.2.01	Pengembangan Penerimaan Perikanan Berbasis Berkas Elektronik	Jumlah Penerimaan Perikanan Berbasis Elektronik	12540 Perikanan Uluhe	12540 Perikanan Uluhe	12540 Perikanan Uluhe	12540 Perikanan Uluhe	175.535.000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi Eksklusif, Inovasi, Riset dan Pengembangan, Pendidikan, Kesehatan dan Demokratisasi Daerah	-	0,00	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.10.04.2.01	2.10.04.2.01	Pemertanahan, analisis, evaluasi, dan selanjutnya di bidang pertanahan, perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANALISA PERENCANAAN RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PROJEKSI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKAWAN PEKERJAAN					KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	Jumlah Penyelesaian Permohonan dan Hambatan yang dihadapi Pegawai/Usaha dalam memaksanakan kegiatan Usahanya	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							5 Kegiatan Usaha	24.024.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER Khusus-DANA Khusus-Non Fisik	-	Pembangunan Ekonomi Penggunaan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.16.05.2.21.0005		Berdasarkan Teknik Kapsida Paksiu Usaha					160 Pelaku Usaha	261.925.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER Khusus-DANA Khusus-Non Fisik	-	Pembangunan Ekonomi Penggunaan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.16.05.2.21.0006		Pengembangan Pariwisata Modal					8 Kegiatan Usaha	47.326.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER Khusus-DANA Khusus-Non Fisik	-	Pembangunan Ekonomi Penggunaan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
II.	2.16.06	PROGRAM PENGDIKSIAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diinformasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha Diakibatkan Evaluasi Pelayanan Kelembagaan Pelayanan Perizinan Bisnisnya	100 %			100 %	38.886.000,00						100 %	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.06.2.01	Penghasilan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ipotesis Penghasilan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %			1 Laporan	36.600.000,00			-	Pembangunan Perizinan dan Pelayanan Publik Asas Berbasis Data dan Digitalisasi Daerah	-	1 Laporan	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.16.06.2.01.0002	Penghasilan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi secara Elektronik yang Dapat Diakses dan Dimanfaatkan				3 Dokumen	36.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Perizinan dan Pelayanan Publik Asas Berbasis Data dan Digitalisasi Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
								9.244.463.225,00							0,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Transisi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya tujuan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan sasaran RPD Kota Pangkalpinang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.